EDISI
MEI - JUNI 2026
TAHUN XVIII





PERDA PENYERTAAN MODAL PERSERODA JAMKRIDA SUMBAR DITETAPKAN



KOTA PADANG MENUJU CITY OF GASTRONOMY UNESCO 2027

MIMBAR

DPRD SUMATERA BARAT // ASPIRATIF - RESPONSIF - INOVATIF



RANPERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DEMI GENERASI BANGSA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING GLOBAL



EVI YANDRI:
MOMENTUM PENGUATAN PELESTARIAN WARISAN BUDAYA



NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT RUU DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU



KOMISI I DPRD SUMBAR TINJAU PENERAPAN SPBE DI KOTA PAYAKUMBUH

Pengantar Redaksi

Majalah MIMBAR kali ini hadir dengan informasi kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang sangat padat pada masa persidangan kedua tahun 2026-2027. Informasi tersebut antara lain penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi usul prakarsa yaitu Ranperda Perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani cukup menyita perhatian karena dua Ranperda ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kualitas generasi harapan bangsa.

Selain itu, ada juga penetapan Peraturan Daerah tentang PT Perseroda Jamkrida, Ranperda tentang Jasa Konstruksi, Ranperda tentang Jalan Provinsi, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dimulainya pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) tahun 2027.

Kemudian, kegiatan anggota DPRD Sumatera Barat melakukan sosialisasi berbagai peraturan daerah provinsi ke masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, kunjungan kerja ke kementerian dan ke daerah lain untuk konsultasi dan studi komparatif, rapat kerja dengan OPD mitra kerja, dan sebagainya. Selain itu juga menerima kedatangan masyarakat untuk berudiensi dan menyampaikan aspirasi, menerima kunjungan dari berbagai pihak termasuk dari DPRD daerah lain.

Redaksi berupaya untuk menyajikan informasi terkait berbagai kegiatan kedewanan tersebut untuk diketahui oleh masyarakat pembaca. Dengan harapan, informasi yang disampaikan melalui MIMBAR ini dapat memenuhi kebutuhan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sekaligus sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Meski demikian, Redaksi menyadari karena terbatasnya ruang menyebabkan tidak seluruh kegiatan kedewanan tersebut dapat disajika di dalam setiap penerbitan Majalah MIMBAR. Masyarakat juga dapat mengunjungi website resmi DPRD Provinsi Sumatera Barat https://dprd.sumbarprov.go.id/ untuk mengakses informasi lebih banyak lagi.

Redaksi juga menyadari tidak ada gading yang tak retak. Untuk itu, Redaksi sangat terbuka terhadap berbagai saran, kritik, dan masukan yang konstruktif dalam rangka peningkatan kinerja penyajian informasi melalui Majalan MIMBAR ke depan.

Selamat membaca

Dahrul Idris, S.STP, M.Si
Pemimpin Redaksi

MIMBAR
DPRD SUMATERA BARAT / ASPIRATIF – RESPONSIF – INOVATIF

Susunan Redaksi
Mimbar DPRD Prov. Sumbar

Ketua:
Drs. H. Muhidi, MM

Wakil Ketua:
Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP
Muhammad Iqra Chissa, S.ST. MM
Nanda Satria, S.IP

Penanggung Jawab:
Drs. Maifrizon, M. Si

Redaktur:
Dahrul Idris, S.STP, M.Si

Penyunting/Editor:
Deny Suryani, S.IP

Fotografer:
Marjoni
Pendika Saputra

Sekretaris:
Arnelly Amran, S.Sos
Taharuddin
Supriyadi

Konsultan:
Padangmedia.com

Sekretariat Redaksi:
Humas DPRD
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 87
Padang, Sumbar

Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593
Fax: (0751) 7059328

Website:
https://dprd.sumbarprov.go.id



Sekapur Sirih

Drs. Maifrizon, M.Si
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menorehkan prestasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025. DPRD Sumatera Barat menyapaikan apresiasi atas capaian Opini WTP yang merupakan nilai tertinggi dari BPK untuk laporan keuangan, serta merupakan yang ke-14 kali secara berturut-turut oleh Provinsi Sumatera Barat.

Seiring dengan itu, pencapaian ini juga diikuti dengan komitmen untuk membantu pemerintah provinsi agar terus mempertahankan opini WTP tersebut di tahun-tahun berikutnya. Sekaligus pula mendorong terlaksananya upaya penyempurnaan dan perbaikan terus menerus dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terkait LHP BPK ini, DPRD Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi telah pula menggelar rapat intensif untuk menindaklanjuti catatan LHP BPK tersebut. Tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dengan tujuan perbaikan dan penyempurnaan jalannya roda pemerintahan secara berkelanjutan.

Dari segi pelaksanaan fungsi, sekretariat DPRD juga terus menyokong DPRD Sumatera Barat dalam pelaksanaan pembentukan rancangan peraturan daerah (ranperda). Saat ini ada sejumlah ranperda yang sedang dibahas yakni ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan, ranperda perlindungan/pemberdayaan petani dan ranperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.

Ranperda pendidikan merupakan pembaruan dari ranperda lama yang dinilai perlu disempurnakan. Ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk merevitalisasi sistem pendidikan di Sumatera Barat. Tujuannya, agar penyelenggaraan pendidikan tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menyentuh substansi mutu dan relevansi.

Sementara itu, ranperda perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Kemudian ranperda pertanggungjawaban APBD seikatan pula dengan fungsi pengawasan DPRD dalam upaya pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan serta program yang tercantum dalam apbd dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Selain menjalankan fungsi legislasi sebagai kelembagaan, seluruh anggota dewan juga terus melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat. Selain menerima aspirasi, seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan menemui masyarakat di masing-masing daerah pemilihan untuk mensosialisasikan peraturan daerah (sosper).

Sosper ini merupakan salah satu kegiatan rutin DPRD Sumatera Barat sebagai upaya untuk memastikan perda bukan hanya sebatas dokumen semata. Melainkan juga menjadi regulasi yang benar-benar dipahami masyarakat untuk kemudian diterapkan sebaik mungkin agar tujuannya tercapai.

Pada akhir bulan Juni ini, DPRD juga telah memulai pembahasan awal anggaran untuk tahun 2027. Proses ini telah dimulai dengan telah diterima rancangan kebijakan umum anggaran - plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS) yang akan menjadi pedoman penyusunan APBD. Dalam penyusunan anggaran ini DPRD salah satunya memastikan prioritas dan efektifitas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Bersama pemerintah provinsi, DPRD Sumatera Barat bertekad mewujudkan tujuan tersebut sebaik mungkin di tengah efisiensi anggaran yang masih berlangsung.

Drs. Maifrizon, M.Si
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat



Sambutan

Drs. H. MUHIDI, MM
Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Barat

Assalamu ‘alaikum wr. Wb

Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah atas keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini merupakan prestasi luar biasa karena mampu dipertahankan 14 kali berturut-turut.

Meski demikian, prestasi ini tentu tidak bisa membuat kita berpuas diri. Justru, harus menjadi cermin untuk berkaca, mengevaluasi untuk memperbaiki, sehingga ke depan kinerja yang telah tercapai saat ini dapat lebih baik lagi. Untuk itu kami meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi, catatan, dan saran yang diberikan oleh BPK di dalam LHP tersebut.

Masa persidangan kedua tahun 2026-2027 ini DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki jadwal yang sangat padat. Sektor pendidikan merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah.

Menjalankan fungsi legislasi, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat, DPRD berinisiatif melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan tujuan melahirkan payung hukum yang lebih kuat dalam upaya meningkatkan kualitas generasi bangsa yang berdaya saing global dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

Selain Pendidikan, DPRD Sumatera Barat juga meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Upaya ini perlu dilakukan mengingat Sebagian besar masyarakat Sumatera Barat hidup dari sektor pertanian.

Selanjutnya, masih dalam fungsi legislasi, DPRD Sumatera Barat juga tengah membahas Ranperda tentang pendapatan daerah dan retribusi daerah. Kemudian juga Ranperda tentang jalan provinsi, serta telah menetapkan Peraturan Daerah tentang PT Perseroan Daerah (Perseroda) Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

DPRD Sumatera Barat juga terus memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait produk hukum daerah yang telah diterbitkan melalui sosialisasi berbagai peraturan daerah ke daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang ada sehingga meningkatkan peran dalam pembangunan daerah.

Menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Sumatera Barat telah melaksanakan banyak kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan. Mulai dari rapat kerja komisi-komisi hingga kunjungan ke lapangan, di mana tujuannya adalah demi perbaikan kinerja pemerintah daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari sisi anggaran, DPRD telah menerima nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUA PPAS) tahun 2027 dari pemerintah daerah untuk dilakukan pembahasan. KUA PPAS merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pembahasan RKUA PPAS tahun 2027 harus dilakukan degan hati-hati mengingat kondisi fiskal daerah yang terbatas sementara kebutuhan anggaran sangat besar. Penanganan dampak bencana pada akhir tahun 2025 lalu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara program pemerintah daerah untuk berbagai sektor juga harus mendapat perhatian serius. Ditambah lagi kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berdampak kepada berkurangnya dana transfer ke daerah harus ditutupi dengan optimalisasi berbagai potensi pendapatan daerah agar kebutuhan anggaran untuk membiayai program pembangunan tetap bisa dipenuhi.

DPRD menyadari bahwa tantangan ke depan dalam percepatan pembangunan daerah masih akan dihadapkan kepada berbagai tantangan yang tidak mudah. Namun demikian, dengan dukungan dari seluruh pihak termasuk dukungan masyarakat, tantangan itu akan bisa dilalui demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Billahi taufiq walhidayah
Wassalam

Drs. H. Muhidi, M.M
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat



Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan

Demi Generasi Bangsa Berkualitas dan Berdaya Saing Global

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ditetapkan menjadi usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan Perda tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan regulasi demi peningkatan kualitas Pendidikan.

Keputusan penetapan Ranperda perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sebagai usul Prakarsa DPRD dilakukan dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026). Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria memimpin rapat paripurna tersebut menegaskan, perubahan dilakukan agar peraturan daerah lebih adaptif terhadap perkembangan dan tuntutan kebutuhan pendidikan.

"Perubahan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk melakukan revitalisasi terhadap sistem pendidikan di Sumatera Barat agar sesuai dengan perkembangan zaman dan menyentuh substansi yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas Pendidikan, sekaligus memperkuat kearifan lokal di dalam penyelenggaraan pendidikan," kata Nanda.

Ia menerangkan, DPRD akan menyegerakan pembahasan ranperda tersebut bersama pemerintah daerah untuk

menghasilkan produk hukum yang mampu menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan.

"Melalui produk hukum ini DPRD ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat mampu mengintegrasikan kecerdasan global dengan kekokohan jati diri generasi Sumatera Barat yang berpegang kepada nilai-nilai kearifan lokal," sebutnya.

Lebih jauh Nanda menambahkan, ranperda tersebut juga memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat, perlindungan hukum kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Ranperda diharapkan menjadi pondasi yang kuat dalam melahirkan generasi emas Sumatera Barat sebagai calon pemimpin masa depan.

Nanda menegaskan, DPRD Sumatera Barat berkomitmen untuk melakukan pembahasan secara komperehensif dan mendalam terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan tersebut. Tim pembahas adalah Komisi V dengan Ketua Tim Muhayatul, Wakil Ketua Syofian Efendi, dan Sekretaris Zaksai Kasni.

Tegaskan Pembangunan Karakter Generasi Minangkabau dan Perlindungan Guru



Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Lazuardi Erman menegaskan, Ranperda Perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan menegaskan pembentukan karakter generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing global tanpa menghilangkan jati diri sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau. Selain itu, di dalam Ranperda perubahan Perda tersebut juga menguatkan perlindungan terhadap tenaga pendidik.

Lazuardi menyampaikan, perubahan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan setelah evaluasi yang mendalam. Dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan Pendidikan belum terakomodir secara optimal padahal aspek tersebut merupakan bagian penting yang menentukan kemajuan di sektor pendidikan.

"Perda yang berlaku saat ini masih lebih banyak mengatur aspek administratif, belum memberikan perhatian yang cukup terhadap penguatan karakter peserta didik berbasis nilai-nilai lokal Minangkabau," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk lebih akomodatifnya produk hukum tersebut, harus menekankan kepada aspek pembentukan karakter generasi Minangkabau secara religius, diplomasi, kewirausahaan, dan seni budaya. Selain itu, juga belum

adanya kebijakan strategis yang mendorong penguasaan bahasa internasional sebagai bekal generasi muda menghadapi persaingan global.

"Penguasaan bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Arab, dan bahasa internasional lainnya menjadi kebutuhan penting agar lulusan pendidikan di Sumatera Barat memiliki daya saing yang lebih baik di tingkat global," katanya.

Lazuardi menambahkan, DPRD juga mendorong agar warisan pendidikan tradisional berbasis surau mendapat perhatian lebih dalam regulasi yang baru. Model pendidikan surau dinilai memiliki nilai historis dan filosofis yang kuat dalam membentuk karakter masyarakat Minangkabau.

"Pendidikan berbasis surau merupakan bagian dari identitas masyarakat Minangkabau yang perlu direvitalisasi dan disinergikan dengan sistem pendidikan modern," ujarnya.

Selain aspek kurikulum dan karakter, Lazuardi juga menegaskan pentingnya aspek perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga pendidik. DPRD Sumatera Barat memandang perlindungan hukum terhadap guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya sangat penting diperhatikan melalui regulasi yang kuat sehingga bisa melaksanakan tugas dengan rasa aman dan bertanggung jawab.

"Guru memiliki peran sentral dalam membangun sumber daya manusia sehingga negara perlu memberikan perlindungan yang kuat agar mereka dapat menjalankan tugas secara professional dan bertanggung jawab," tegasnya.

Lazuardi mengingatkan, Pendidikan harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus sebagai sarana peningkatan kualitas ekonomi dan memperluas kesempatan hidup lebih baik. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas an produktivitas tenaga kerja, tetapi juga memperkuat kehidupan sosial dan pembentukan karakter generasi bangsa.

"Kami berharap melalui konsultasi ke Kemendikdasmen ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melahirkan peraturan daerah yang berkualitas, sesuai dengan karakter daerah, berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas generasi bangsa, serta selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional di sektor pendidikan," tandasnya.

Konsultasi ke Kemendiknas untuk Sinergitas Program Pendidikan di Daerah dan Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melakukan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (3/6/2026). Konsultasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang dibuat selaras dengan program dan kebijakan nasional di sektor pendidikan sehingga terbangun sinergitas yang kuat antara program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi memimpin kunjungan konsultasi tersebut bersama Wakil Ketua DPRD, Evi Yandri Rajo Budiman diikuti oleh pimpinan dan anggota Komisi V. Untuk diketahui,



Ranperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan komisi V sebagai tim pembahas.

"Kunjungan konsultasi ke Kemendiknas ini bertujuan untuk menyelaraskan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan di

tingkat nasional, sehingga program dan kebijakan yang dilahirkan nantinya oleh pemerintah daerah berdasarkan perda yang telah dibuat tersebut juga sinergi dengan program pendidikan pemerintah pusat," kata Muhidi.

Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut merupakan usul prakarsa DPRD Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna pada 6 Mei 2026. Saat ini pembahasannya telah memasuki tahapan lanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Langkah Strategis Mempersiapkan Generasi Bangsa untuk Investasi Jangka Panjang



Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan, Ranperda Perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi bangsa Sumatera Barat yang unggul dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan tidak meninggalkan identitas daerah.

"Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi yang cerdas, terampil, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," kata Muhidi.

Menurutnya, perkembangan teknologi, perubahan sistem pembelajaran, serta kebutuhan dunia kerja yang terus berubah menuntut adanya penyempurnaan regulasi pendidikan agar lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Ia menambahkan, mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dan berkualitas merupakan investasi masa depan yang tidak ternilai. Hasilnya tidak saja akan dinikmati oleh mereka yang belajar saat ini tetapi juga memberikan manfaat besar kepada seluruh masyarakat dan kemajuan daerah di masa mendatang.

"DI masa depan, generasi bangsa ini akan memanfaatkan kualitas sumber daya yang dimilikinya untuk berkarya, menciptakan berbagai lapangan kerja, memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah yang tentunya akan berdampak besar kepada kesejahteraan masyarakat dengan tetap memegang teguh jati diri sebagai orang Minang," terangnya. *



Angin Segar Pelaku Usaha

Perda Penyertaan Modal Perseroda Jamkrida Sumbar Ditetapkan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan perseroan daerah (Perseroda) Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) menjadi peraturah daerah. Penetapan Perda tersebut memberikan angin segar bagi pelaku usaha terutama UMKM karena modal Perseroda akan meningkat sehingga bisa memperluas jangkauan penjaminan kredit.

Penetapan Perda Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda Jamkrida tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa (5/5/2026). Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman membuka rapat paripurna menjelaskan, Perseroda Jamkrida merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaksanakan mandat penjaminan kredit bagi masyarakat dalam memperoleh akses permodalan dari perbankan.

"BUMD ini dalam menjalankan usahanya mendapatkan mandat penjaminan bagi masyarakat dalam memperoleh akses permodalan dari perbankan," kata Evi Yandri.

Dengan keberadaan Perseroda Jamkrida, lanjut Evi Yandri, maka masyarakat mendapatkan penjaminan untuk mendapatkan akses modal dari perbankan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Dengan demikian, Jamkrida menjadi angin segar bagi masyarakat pelaku usaha untuk berkembang karena lebih mudah dalam mengajukan kredit modal usaha.

Perubahan untuk Akomodir Penambahan Modal dan Aset

Evi Yandri menjelaskan, Perseroda Jamkrida yang sebelumnya Bernama PT Jamkrida sebelumnya telah mendapatkan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp78,6 miliar. Selain itu juga telah ditambah dengan asset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp10,8 miliar yang belum dapat ditambahkan sebagai modal disetor.

"Hal ini disebabkan berdasarkan Perda yang lama, maka totalnya akan melebihi jumlah penyertaan modal pemerintah daerah yang ditetapkan sebesar Rp81 miliar," ujarnya.

Perseroda Jamkrida Akan Dapat Suntikan Hingga Rp400 Miliar

Dengan Peraturan Daerah (Perda) yang baru, Perseroda



Jamkrida akan mendapatkan suntikan dana penyertaan modal pemerintah daerah hingga Rp400 miliar yang akan dipenuhi secara bertahap.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri menjelaskan, Perseroda Jamkrida merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selama ini telah melaksanakan mandat penjaminan bagi masyarakat dalam memperoleh akses modal pada perbankan.

"Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp78,6 miliar kepada PT Jamkrida. Selain itu, juga telah ditambah dengan aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp10.804.804.000 yang belum dapat ditambahkan sebagai modal disetor karena totalnya akan melebihi jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp81 miliar dengan Perda yang berlaku saat ini," terang Evi Yandri.

Dengan perkembangan yang ada, lanjutnya, bentuk hukum PT. Jamkrida Sumbar juga telah dilakukan penyesuaian menjadi Perseroda yang ditetapkan dengan Perda No. 6 Tahun 2024. Dalam Perda tersebut ditetapkan bahwa modal dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp400 miliar.

"Dengan telah berubah menjadi Perseroda, modal dasar yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentunya harus dipenuhi secara bertahap. Modal tersebut tentu akan sangat menentukan bagaimana PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) dapat melakukan percepatan ekspansi penjaminan kredit untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat," ujarnya.

Untuk itu, dengan melakukan perubahan Perda terhadap Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dalam mengakses modal dan memberi dampak terhadap peningkatan penerimaan daerah dari Sektor PAD.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam menyambut penetapan Perda tersebut menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan yang diberikan. Menurut Mahyeldi, Ranperda tentang penyertaan modal tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja PT Jamkrida dalam memperkuat struktur permodalan dan memperluas akses pembiayaan pelaku usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Dengan memperkuat permodalan, diharapkan PT Jamkrida mampu meningkatkan kapasitas kredit sehingga mendorong akses pembiayaan pelaku usaha terutama UMKM yang nantinya akan memberikan dampak kepada peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Mahyeldi.

Dia menambahkan, melalui penguatan tersebut diharapkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha semakin luas dan inklusif. Dengan demikian, akan mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat yang akan berdampak kepada peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Lebih jauh, penguatan PT Jamkrida tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Sekaligus, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Diharapkan Percepat Ekspansi Penjaminan Kredit Masyarakat

Evi Yandri berharap, perubahan regulasi Perseroda Jamkrida tersebut agar dapat melakukan percepatan ekspansi penjaminan kredit untuk masyarakat. Untuk itu, dengan melakukan perubahan perda diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan OJK (otoritas jasa keuangan).

Selain juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi

masyarakat dalam mengakses modal dan memberi dampak terhadap peningkatan penerimaan daerah dari sektor PAD (pendapatan asli daerah). Ia menegaskan, dalam penyusunan perda baru tersebut, DPRD melalui tim pembahasan dari Komisi III telah melakukan sejumlah tahapan sesuai ketetapan regulasi.

Ketua tim pembahasan perda Perseroda Jamkrida, Irwan Zuldani mengatakan, pembahasan akhir antara panitia pembahasan bersama pemerintah daerah pada tanggal 25 November 2025. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahapan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilaksanakan dari Desember 2025 himgga Maret 2026.

"Dari proses fasilitasi tersebut terdapat sejumlah saran perbaikan, di mana ranperda yang awalnya terdiri dari 13 pasal, berubah menjadi hanya 9 pasal. Selain ditambah sejumlah perbaikan dan penyesuaian lainnya," kata Irwan.

Ia menambahkan, sekalipun terdapat sejumlah perbaikan terhadap ranperda melalui proses konsultasi Kemendagri, secara substansi hal tersebut tetap sejalan dengan tujuan awal dilakukan perumusan Perda, yaitu untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi Jamkrida dalam melaksanakan mandatnya melakukan penjaminan.

"Perubahan dalam proses konsultasi tersebut juga dapat menjadi dorongan agar Jamkrida beroperasi lebih baik dengan gearing rasio yang sehat dan diharapkan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat serta menambah PAD bagi daerah," tandasnya. *

Sosialisasi Perda Keterbukaan Informasi Publik

Nanda Satria Dorong Masyarakat Paham Keterbukaan Informasi



Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria mendorong masyarakat semakin memahami tentang keterbukaan informasi publik. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah sebagai badan publik, meskipun juga ada item-item informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Nanda Satria memaparkan hal itu dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Halaman Museum Adityawarman, Jalan Gereja, Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sabtu (13/6/2026).

"Perda ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat terkait informasi publik sebab sesuai peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak mengetahui hal tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan transparansi dalam tata Kelola pemerintahan," kata Nanda.

Ia menjelaskan, Perda Keterbukaan Informasi Publik sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam mengetahui tata kelola pemerintah. Namun demikian, ada item-item informasi yang memang dikecualikan di dalam aturan tersebut.

Menurut Nanda, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih akan terwujud dengan aplikasi keterbukaan informasi yang baik kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga mendukung terpenuhinya hak masyarakat untuk tahu berbagai program dan kegiatan pemerintah.

"Masyarakat memiliki hak untuk mengakses berbagai informasi terkait pelaksanaan jalannya program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut dengan tidak mengabaikan ketentuan pengecualian terhadap informasi tertentu," ujarnya.

Lebih jauh menurut Nanda, keterbukaan informasi sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagi masyarakat, hal itu dapat dijadikan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat terhadap program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi sarana pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dalam sosialisasi yang jua dihadiri oleh ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Idham Fadli tersebut, Nanda berharap, dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keterbukaan informasi. Jika dalam pemenuhan haknya terhadap informasi tidak ditanggapi oleh badan publik, masyarakat dapat mengajukan sengketa terhadap badan publik bersangkutan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. P

Ali Muda Sosialisasi Perda Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan di Pasaman



Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan lahir sebagai upaya pemerintah daerah untuk memayungi pengelolaan komoditas unggulan perkebunan dapat berjalan dengan baik. Perda tersebut memberikan regulasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan perkebunan mulai dari budidaya, pembinaan petani, hingga pemasaran, serta peningkatan nilai tambah produksi komoditas.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Ali Muda saat melakukan sosialisasi Perda tersebut di Gedung Serbaguna Nagari Taruang-Taruang Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sabtu (13/6/2026). Sosialisasi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan komoditas unggulan perkebunan yang terarah, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

"Perda ini lahir sebagai upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap pengelolaan komoditas perkebunan, baik dari segi budidaya, peningkatan nilai

tambah, pembinaan petani, hingga pemasaran agar berjalan baik dan mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat," kata Ali Muda.

Ia menyebutkan, Perda Nomor 3 tahun 2023 tersebut meruppakan salah satu produk hukum daerah untuk penopang perekonomian masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan pengembangan komoditas perkebunan unggulan dapat berjalan optimal hingga masyarakat petani dapat menikmati hasil yang memuaskan.

Untuk itu, lanjutnya, keberadaan Perda tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar semakin memahami regulasi yang dibutuhkan untuk peningkatan usaha perkebunan yang dikelola. Sebab, dengan adanya Perda tersebut, membuka peluang bagi pemanfaatan berbagai program pemerintah di bidang perkebunan secara lebih maksimal.

Ia menambahkan, Sumatera Barat memiliki potensi besar di bidang perkebunan, termasuk di Kabupaten Pasaman. Mulai dari kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan lainnya.

"Komoditas tersebut bisa dijadikan sebagai produk unggulan perkebunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi lahan yang dimiliki. Selanjutnya, berdasarkan Perda, akan banyak peluang pemanfaatan program pemerintah yang bisa diraih untuk meningkatkan produksi, sumber daya manusia, termasuk juga untuk membuka jalur pemasaran dan menjaga stabilitas Harga," ujarnya.

Ia berharap, melalui sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bisa dijadikan sebagai paying hukum untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan peningkatan tata Kelola, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan produksi komoditas perkebunan masyarakat akan semakin meningkat dan berdaya saing. P

Dua Ranperda Ditetapkan Jadi Usul Prakarsa DPRD Sumbar

Penyelenggaraan Pendidikan dan Perlindungan Petani

Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yaitu Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan menjadi usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan. Keputusan penetapan dua Ranperda tersebut sebagai usul Prakarsa DPRD dilakukan dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026).

Revitalisasi Sistem Pendidikan Agar Adaptif Terhadap Perkembangan Zaman

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria memimpin rapat paripurna tersebut menegaskan, perubahan dilakukan agar peraturan daerah lebih adaptif terhadap perkembangan dan tuntutan kebutuhan pendidikan.

"Perubahan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk melakukan revitalisasi terhadap sistem pendidikan di Sumatera Barat agar sesuai dengan perkembangan zaman dan menyentuh substansi yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas Pendidikan, sekaligus memperkuat kearifan lokal di dalam penyelenggaraan pendidikan," kata Nanda.

Ia menerangkan, DPRD akan menyegerakan pembahasan ranperda tersebut Bersama pemerintah daerah untuk menghasilkan produk hukum yang mampu menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan.

"Melalui produk hukum ini DPRD ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat mampu mengintegrasikan kecerdasan global dengan kekokohan jati diri generasi Sumatera Barat yang berpegang kepada nilai-nilai kearifan lokal," sebutnya.

Lebih jauh Nanda menambahkan, ranperda tersebut juga memberikan jaminan keadilan bagi seluruh



masyarakat, perlindungan hukum kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Ranperda diharapkan menjadi pondasi yang kuat dalam melahirkan generasi emas Sumatera Barat sebagai calon pemimpin masa depan.

Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat Lazuardi Erman menjelaskan, Ranperda Perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan menegaskan pembentukan karakter generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing global tanpa menghilangkan jati diri sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau. Selain itu, di dalam Ranperda perubahan Perda tersebut juga menguatkan perlindungan terhadap tenaga pendidik.

Ia menambahkan, untuk lebih akomodatifnya produk hukum tersebut, harus menekankan kepada aspek pembentukan karakter generasi Minangkabau secara religius, diplomasi, kewirausahaan, dan seni budaya. Selain itu, juga belum adanya kebijakan strategis yang mendorong penguasaan bahasa internasional sebagai bekal generasi muda menghadapi persaingan global.

Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk Wujudkan Kemandirian

Sementara itu, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan untuk kemandirian dan kedaulatan petani. Menurut Nanda, sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Masyarakat Sumatera Barat terutama di wilayah pedesaan dan nagari-nagari, menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian.

"Namun demikian, petani masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses terhadap modal, sarana produksi, teknologi pertanian, hingga fluktuasi harga komoditas yang tidak menguntungkan," jelasnya.

Substansi pokok Ranperda mencakup pengaturan mengenai perencanaan pertanian terpadu, perlindungan lahan pertanian, kemudahan akses pembiayaan dan asuransi pertanian, pemberdayaan kelembagaan petani, penyuluhan dan pelatihan pertanian, serta penguatan sistem pemasaran hasil pertanian. Dengan hadirnya Perda tersebut, ia berharap petani Sumatera Barat dapat lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global.

Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Khairuddin Simanjuntak memaparkan, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diusulkan DPRD melalui Komisi II. Sebagai pemrakarsa, ia menjelaskan tujuan diusulkannya Ranperda tersebut antara lain untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, juga untuk menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen. Kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan, serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani. P



Nanda Satria Tegaskan Dukungan DPRD Sumbar untuk

Kota Padang Menuju City of Gastronomy UNESCO 2027

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menjadikan Kota Padang masuk ke dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network (UCCN) Kategori City of Gastronomy tahun 2027. Langkah tersebut merupakan momentum strategis untuk mengangkat budaya dan kuliner Minangkabau ke panggung internasional.

"Perjuangan Pemko Padang menjadikan Kota Padang sebagai kota gastronomi dunia bukan sekadar agenda seremoni atau pencapaian administratif semata, melainkan bagian dari ikhtiar besar mengangkat marwah budaya Minangkabau melalui kekuatan kuliner yang telah lama mendunia," ungkap Nanda, Senin (11/5/2026).

Ia menegaskan, langkah tersebut tidak hanya tentang Kota Padang, namun memberi arti lebih luas lagi kepada Provinsi Sumatera Barat untuk memperlihatkan identitas dan kekuatan budaya Minangkabau kepada dunia internasional. Kuliner Minangkabau memiliki sejarah panjang, filosofi, nilai sosial, hingga kekuatan ekonomi yang sangat besar.

"Karena itu, DPRD Sumatera Barat memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang sedang diperjuangkan Pemko Padang tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, pengakuan UNESCO akan menjadi momentum penting untuk memperkuat tidak hanya Kota Padang namun juga Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan wisata budaya dan gastronomi nasional. Dampaknya akan mendorong perekonomian masyarakat melalui UMKM, industri kreatif, pertanian, hingga pelaku usaha jasa lainnya.

Lebih jauh, Nanda menyampaikan keinginannya agar kekayaan kuliner Minangkabau tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga karena ekosistem budayanya yang kuat dan berkelanjutan. Tradisi seperti makan bajamba, nilai kebersamaan, hingga proses pengolahan makanan tradisional merupakan kekuatan yang memiliki nilai tersendiri.

Nanda juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawal seluruh tahapan seleksi UCCN. Seluruh unsur, baik pemerintah daerah maupun pusat, serta seluruh unsur masyarakat hendaknya bergerak bersama-sama karena hal itu merupakan momentum yang besar bagi kemajuan daerah. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Kota Padang namun juga oleh seluruh Sumatera Barat.

Langkah Pemko Padang untuk masuk sebagai City of Gastronomy UNESCO 2027 tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ekonomi Kreatif. Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, keinginan menjadikan Kota Padang sebagai pusat kuliner nasional akan semakin memperkuat jati diri daerah tersebut sebagai wilayah dengan keberagaman gastronomi yang kaya dan bernilai jual tinggi.

Jika berhasil menembus dan ditetapkan dalam jaringan UCCN nantinya, Kota Padang akan menyusul jejak kota-kota kreatif Indonesia lainnya yang telah lebih dahulu diakui oleh UNESCO. Kota-kota tersebut antara lain Pekalongan, Surakarta, dan Ponorogo sebagai Kota Kerajinan dan Kesenian, Kota Bandung sebagai Kota Desain, Kota Ambon sebagai Kota Musik, Jakarta sebagai Kota Literasi, serta Kota Malang sebagai Kota Kreatif Seni Media. P

Muhidi: Maknai Pancasila, Persatuan dan Kepedulian Sosial Kunci Keutuhan Bangsa



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan, rasa persatuan dan kepedulian sosial merupakan kunci keutuhan bangsa. Bersatu di tengah keberagaman dan peduli antar sesama anak bangsa akan mengukuhkan rasa nasionalisme dan semangat patriotisme untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu ditegaskan Muhidi usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Juni 2026 di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (1/6/2026). Menurutnya, semangat persatuan dan peduli sosial tersebut menjadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

"Keutuhan bangsa ini ditentukan oleh seberapa kuatnya semangat persatuan dan kepedulian sosial tumbuh di tengah masyarakat, ini termaktub di dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila," katanya.

Muhidi menyebutkan, setiap sila yang ada di dalam Pancasila memuat pedoman penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dan agama, dengan beragam perbedaan dan kemajemukannya.

"Perbedaan dan keberagaman tersebut tidak menjadikan Bangsa Indonesia terpecah belah, justru telah terbukti menjadi kekuatan yang besar dalam mempertahankan kedaulatan NKRI," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, ia mengajak seluruh elemen

bangsa menjadikan momentum Hari Kesaktian Pancasila sebagai perekat keberagaman tersebut untuk memperkukuh rasa persatuan demi menguatkan kedaulatan NKRI. Ia menegaskan, keberagaman bukan penghalang, justru menjadi kekuatan yang harus dikelola untuk kemajuan bangsa.

"Pesan penting dari Pancasila adalah kerukunan hidup beragama, bersatu dalam keberagaman, saling menghargai dan peduli sesama," tegasnya.

Ia menambahkan, sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa di mana artinya bangsa Indonesia adalah umat beragama yang beradab dan sangat menghargai kemanusiaan. Dengan demikian, sikap menghargai kemanusiaan tersebut akan menciptakan rasa persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya akan melahirkan rasa peduli antar sesama, bersikap adil dan saling tolong menolong dalam kehidupan sosial.

"Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sangat penting untuk diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan rasa aman, nyaman, mengukuhkan persatuan, saling menghormati, dan saling tolong menolong dalam kehidupan," tandasnya. P

Tim Ahli DPRD Sumbar Kaji Efektivitas Perda Trantibum Linmas Dalam Berantas LGBT

Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mendalami efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mengatasi persoalan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Bahasan tersebut dilakukan dalam rapat rutin bulanan di Ruang Khusus II Gedung DPRD Sumatera Barat, Rabu (10/6/2026). Dipimpin Ketua Tim Ahli, H. M. Nurnas, diskusi tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif terkait efektivitas regulasi daerah dalam merespons berbagai dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

"Tim Ahli DPRD Sumbar berupaya memberikan masukan dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek hukum, sosial, budaya, maupun implementasi kebijakan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan daerah," ujar Nurnas.



Menurutnya, keberadaan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 perlu dikaji secara mendalam. Kajian tersebut harus dilakukan untuk melihat sejauh mana Perda tersebut mampu menjawab permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk persoalan yang menjadi perhatian publik seperti LGBT.

Masukan dan pertimbangan yang dihimpun di dalam rapat rutin tersebut akan disimpulkan sebagai upaya memperkaya kajian terhadap efektivitas perda dimaksud dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hasil pembahasan akan disampaikan sebagai masukan kepada DPRD dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah. P

Ketua DPRD Sumbar Muhidi:

Peringatan Tahun Baru Islam Momentum Evaluasi dan Introspeksi Diri



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengajak seluruh umat Islam untuk menjadikan peringatan tahun baru Islam 1 Muharam 1448 H sebagai momentum evaluasi dan introspeksi. Perjalanan waktu hendaknya diikuti oleh kemajuan dalam memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah serta kualitas diri agar sukses dunia dan akhirat.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H di Masjid Darul Amal, Kelarahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Selasa (16/6/2026).

"Tahun baru Islam harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas diri dan memperkuat komitmen dalam menjalankan ajaran agama," kata Muhidi.

Salah satu indikator penting dalam kehidupan seorang muslim, katanya, adalah kualitas salat yang dijalankan. Salat merupakan bukti keimanan dan ketauhidan manusia kepada Allah SWT. Jika ingin meraih kemuliaan hidup, maka jagalah salat lima waktu dan lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah seperti salat tahajud.

Ia menambahkan, salat yang dilakukan dengan khusyuk tidak hanya mendekatkan seseorang kepada Allah SWT, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia dan karakter yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

"Momentum Muharam 1448 Hijriah, diharapkan agar semakin bersemangat memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, serta menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, cita-cita meraih keberhasilan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat dapat terwujud," ujarnya.

Muhidi menekankan pentingnya melakukan muhasabah atau introspeksi diri di awal tahun hijriah. Menurutnya, setiap individu perlu mengevaluasi perjalanan hidup yang telah dilalui, baik dalam urusan pekerjaan, ibadah, maupun kontribusi kepada sesama. P

DPRD Tanahdatar Konsultasi Pembahasan LKPJ ke DPRD Sumbar



Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanahdatar melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (6/5/2026). Kunjungan kerja tersebut adalah dalam rangka konsultasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2025.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Dahrul Idris menerima kunjungan tersebut menyampaikan, pertemuan banyak diisi dengan diskusi terkait mekanisme pembahasan LKPJ, evaluasi pelaksanaan program pembangunan, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD.

"Seperti diketahui bahwa LKPJ merupakan salah satu instrumen penting bagi DPRD dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dimiliki, demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel," kata Idris.

Ia menyampaikan, konsultasi tersebut dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tanahdatar adalah dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan tersebut melalui mekanisme pembahasan yang mendalam dan komperehensif. Dengan demikian, DPRD akan dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif terhadap pemerintah daerah, juga koreksi dan catatan strategis untuk perbaikan program pembangunan ke depan.

Selain itu, lanjutnya, konsultasi dan koordinasi antarlembaga DPRD memiliki peran strategis dalam penguatan hubungan kelembagaan sehingga tercipta sinergitas dalam melaksanakan fungsi kedewanan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Melalui kunjungan tersebut, diharapkan terjalin hubungan kelembagaan yang semakin solid antara DPRD Kabupaten Tanahdatar dan DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mensinergikan program pembangunan daerah. P



Seratus Tahun Jam Gadang

Evi Yandri: Momentum Penguatan Pelestarian Warisan Budaya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan, peringatan 100 tahun Jam Gadang dapat dijadikan momentum untuk penguatan upaya pelestarian warisan budaya. Jam Gadang bukan sekadar symbol namun memiliki makna tersendiri dalam perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa.

Hal itu disampaikan Evi Yandri saat menghadiri Jam Gadang Fun Run yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang, Minggu (7/6/2026). Peringatan 100 Tahun Jam Gadang itu sendiri diselenggarakan bersamaan dengan International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) ke-4 mulai tanggal 4 sampai 21 Juni 2026.

"Peringatan 100 Tahun Jam Gadang ini bukan sekadar seremoni semata namun hendaknya dijadikan sebagai momentum penguatan upaya pelestarian warisan sejarah dan warisan budaya," kata Evi Yandri.

Dalam kegiatan Jam Gadang Fun Run di pedestrian Jam Gadang tersebut, Evi Yandri melihat, rangkaian kegiatan peringatan 100 tahun Jam Gadang berhasil menggabungkan semangat olah raga, pelestarian budaya, sekaligus promosi wisata dalam satu kegiatan yang cukup meriah.

Kehadiran ribuan orang dalam peringatan itu, termasuk delegasi IMLF dari mancanegara menjadi sarana yang tepat untuk mempromosikan pariwisata Sumatera Barat sebagai tujuan kunjungan wisatawan internasional yang menarik.

Ia berharap, melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan wisata ke Sumatera Barat sekaligus meningkatkan semangat untuk melestarikan warisan sejarah dan budaya. Jam Gadang sebagai ikon diharapkan dapat menjadi magnet penarik kunjungan wisata sehingga akan memberikan dampak positif kepada perekonomian masyarakat. P

Endarmy Sosialisasi Perda Wisata Halal di Nagari Anduriang



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Endarmy mendorong pergerakan ekonomi kreatif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk lokasi wisata.

Dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal di Jorong Lubuak Napa Nagari Anduriang Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Minggu (14/6/2026), Endarmy menyampaikan, sebagai anggota Komisi V terus mendorong percepatan pembangunan di bidang kepariwisataan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Ia menyebutkan, adanya Perda tentang Penyelenggaraan Wisata Halal hendaknya menjadi momentum untuk menggali dan mengembangkan potensi wisata di setiap daerah termasuk di Nagari Anduriang. Menurutnya, di daerah itu memiliki objek wisata yang bisa diunggulkan seperti air terjun, arung jeram, dan sebagainya.

"Ini merupakan potensi besar yang bisa dikembangkan untuk menjadi wisata unggulan yang nantinya akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Untuk menunjang pengembangan objek wisata menurut Endarmy, yang perlu dilakukan adalah peningkatan sarana prasarana seperti akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya. "Akses jalan dan fasilitas pendukung ini sangat penting agar pengunjung mudah mencapai objek wisata," lanjutnya.

Bergabung di Komisi V DPRD Sumatera Barat yang salah satunya membidangi pariwisata, Endarmy menegaskan dirinya terus berupaya memperjuangkan peningkatan aksesibilitas objek wisata. Sarana infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata menjadi fokus perhatian dengan tujuan untuk memajukan objek wisata agar semakin dikenal oleh wisatawan.

Ia meyakini, dengan terbukanya objek wisata akan memberikan dampak ganda kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada kemajuan daerah. Perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata akan meningkat dengan ramainya kunjungan ke daerah itu. Usaha kuliner, cinderamata, usaha jasa transportasi, penginapan, dan usaha jasa lainnya akan terbuka.

"Selain peningkatan aksesibilitas, kemajuan pariwisata juga harus didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, melahirkan berbagai inovasi, meningkatkan kenyamanan dan keamanan lokasi, sehingga objek wisata semakin diminati oleh pengunjung," tandasnya. P

Muhidi Ajak Diaspora Minang Berkolaborasi untuk Percepatan Pembangunan Daerah



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan, percepatan pembangunan daerah membutuhkan sinergi dengan semua pihak, pemerintah, dunia usaha, termasuk diaspora Minang yang ada di perantauan. Kondisi fiskal daerah saat ini sangat terbatas sehingga pembangunan tidak bisa hanya bertumpu kepada keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) di Jakarta Sabtu (23/5/2026). Menurutnya, diaspora Minang memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan penopang ekonomi melalui sinergi dan kolaborasi yang baik.

“Percepatan pembangunan Sumatera Barat membutuhkan sinergi dengan semua pihak, jangan hanya mengandalkan APBD, hendaknya diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha serta diaspora Minangkabau," kata Muhidi.

Menurut Muhidi, Sumatera Barat memiliki banyak komoditas unggulan yang belum meningkatkan nilai tambah karena masih terkendala modernisasi industri. Komoditas unggulan tersebut Sebagian besar masih dijual dalam kondisi "mentah", belum berupa barang jadi sehingga dampak ekonominya juga belum maksimal.

"Mestinya komoditas unggulan tersebut dikembbangkan menjadi industri yang memiliki nilai jual lebih tinggi, sekaligus membuka lapangan kerja lebih banyak lagi sehingga dampak ekonominya lebih besar lagi untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Untuk industrialisasi komoditas tersebut menurut Muhidi, membutuhkan investasi dan diaspora Minang memiliki potensi untuk itu. Iklim investasi harus diciptakan nyaman dan berkelanjutan sehingga memberikan kontribusi lebih besar lagi kepada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengakui, beberapa kendala yang masih sering terjadi dalam investasi adalah persoalan lahan dan beberapa kendala lainnya. Untuk itu, Sementara disadari bahwa investasi membutuhkan kepastian hukum dan kenyamanan, serta dukungan sosial.

"DPRD Sumatera Barat melalui fungsi legislasi akan terus berupaya memperkuat kepastian hukum untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Muhidi memaparkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan. Konsep tersebut menempatkan pembangunan daerah tidak lagi bersifat sentralistik, namun dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, perantau, dan pelaku usaha.

"Kolaborasi ini diyakini akan membuat ekonomi lebih fleksibel, adaptif, dan memiliki daya tahan yang lebih kuat menghadapi gejolak ekonomi global. Lagi pula, dalam konsep ini tanah ulayat yang selama ini sebagai kendala dalam investasi akan menjadi bagian dari sinergi dalam pengembangan investasi," ujarnya. P

Irwan Zuldani Sosialisasikan Perda Pengelolaan Sampah di Aia Pacah



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Irwan Zuldani mengingatkan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Sampah jangan hanya dipandang sebagai barang bekas yang harus dibuang, padahal masih bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi.

Hal itu disampaikan Irwan Zuldani saat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Jumat (12/6/2026).

"Pengelolaan sampah jika dilakukan dengan baik masih bisa dijadikan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi, sebaliknya jika pengelolaannya tidak baik akan memengaruhi berbagai sektor tidak terkecuali pariwisata," kata Irwan.

Ia menegaskan, Perda Pengelolaan Sampah dibuat untuk mengatur pengelolaan sampah terpadu dengan tujuan agar dalam penanganan sampah tidak langsung bermuara di tempat pembuangan akhir. Sampah masih bisa dipilah Kembali untuk dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi hingga tersisa ampas yang memang tidak bisa lagi dimanfaatkan baru kemudian dibuang ke TPA.

Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah tersebut juga menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Wardoyo. Menurut Wardoyo, Perda tersebut memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah sehingga bisa dimanfaatkan kembali, sekaligus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Menurutnya, sampah bisa dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan sebelum berakhir di TPA. Misalnya untuk didaur ulang, untuk kompos, dan sebagainya. Pengolahan tersebut akan mendatangkan nilai tambah ekonomi sekaligus bisa mengurangi volume sampah yang semakin hari semakin meningkat. P

Zaksai Kasni Tegaskan Negara Harus Hadir untuk Lindungi Kelompok Rentan



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hj. Zaksai Kasni menegaskan, kelompok masyarakat rentan harus medapat perlindungan dari pemerintah. Perlindungan tersebut bisa berbentuk program bimbingan teknis maupun berbentuk bantuan sosial.

"Perlindungan terhadap masyarakat rentan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk masyarakat agar tidak semakin terpuruk, bisa dilakukan melalui berbagai upaya seperti memberikan bimbingan atau pelatihan yang memadai maupun berbentuk bantuan sosial," katanya saat sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya, Jumat (13/6/2026).

Ia menegaskan, lahirnya Perda Kesejahteraan Sosial tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam bentuk payung hukum yang akan diikuti oleh berbagai program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat terutama bagi kelompok rentan.

"Dengan adanya Perda ini pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan terutama kelompok rentan," ujarnya.

Ia menambahkan, Perda tersebut menjadi landasan hukum baagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program yang tepat dan berkelanjutan. Sehingga, berbagai program seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan sosial, dan perlindungan social dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan terencana.

"Sasaran dari Perda ini terutama adalah kelompok masyarakat kurang mampu, anak-anak terlantar, termasuk juga masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas, untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, mendapat perhatian dan perlindungan yang baik," lanjutnya.

Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat tersebut menerangkan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat semakin memahami peraturan daerah dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Peraturan itu dilahirkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh ia menyebutkan, sebaik apapun program dari pemerintah tanpa dukungan dari masyarakat tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan program kesejahteraan sosial membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama dari masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat sehingga program yang dilaksanakan tepat sasaran.

Ia berharap, melalui sosialisasi perda tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan pemahaman yang baik akan bermanfaat kepada pengawasan masyarakat terhadap program pemerintah apakah sydah tepat sasaran atau tidak.

"Pemahaman yang baik terhadap peraturan daerah akan membuat kesadaran masyarakat semakin tinggi sehingga dapat mengawasi agar program pemerintah telah berjalan sesuai dengan aturan dan tepat pada sasaran" tandas politisi Partai Golkar tersebut. P



DPRD Sumbar Bersama Tim Ahli Lakukan Kajian

Naskah Akademik dan Draf RUU Daerah Istimewa Minangkabau

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menyerahkan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Istimewa Minangkabau kepada tim ahli. Penyerahan tersebut sebagai langkah awal untuk menggali dan mengkaji lebih detail terkait gagasan pengajuan dokumen tersebut oleh Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM), Jumat (8/5/2026).

"Wacana Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) yang terus diperjuangkan BP2DIM ini ditindaklanjuti dengan mengkaji dari berbagai aspek bersama tim ahli," ujar Muhidi, Senin (11/6/2026).

Ia menegaskan, DPRD Sumatera Barat ingin melihat secara komprehensif aspek hukum dan mekanisme pengajuan RUU tersebut, termasuk prosedur konstitusional yang harus ditempuh. Langkah itu merupakan bentuk komitmen dalam menindaklanjuti setiap gagasan strategis yang berkembang di tengah masyarakat.

"Peluang dan tantangan dari gagasan pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau ini harus dilihat secara utuh, baik dari sisi regulasi, adminstrasi, maupun aspek sosial, sejarah dan budaya," ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD Provinsi Sumatera Barat terbuka untuk memberi ruang kepada setiap gagasan yang bertujuan memperkuat posisi dan kekhususan budaya Minangkabau dalam sistem pemerintahan daerah. Meski demikian, gagasan tersebut harus didalami secara seksama, agar tetap sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebelumnya, BP2DIM telah menyerahkan naskah akademik dan draf RUU Daerah Istimewa Minangkabau kepada Ketua DPRD Sumatera Barat. BP2DIM berharap hal itu dapat menjadi pintu masuk dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait penguatan kekhususan Minangkabau melalui jalur konstitusional. BP2DIM memperjuangkan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau untuk memperkuat kekhususan status Minangkabau dengan filosofi Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah. T

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman:

Generasi Muda Harus Jadi Garda Terdepan Jaga Persatuan Bangsa



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mengingatkan kepada generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Generasi muda harus memiliki semangat nasionalisme sebagai harapan masa depan bangsa.

Hal itu disampaikan Evi Yandri saat menghadiri kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Keluarga Besar TNI Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Tuanku Imam Bonjol, Jumat (22/5/2026). Politisi yang juga Ketua DPD Pemuda Panca Marga Sumatera Barat tersebut menyatakan, kegiatan yang berlangsung di Makodam TNI-AD XX/TIB itu sebagai momentum penting dalam memperkuat jiwa nasionalisme, persatuan, dan cinta tanah air.

"Ini menjadi momentum penting untuk memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air, generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan nilai-nilai kebangsaan," katanya.

Ia berharap, melalui kegiatan pembinaan bela negara tersebut, dapat mendorong lahirnya generasi muda yang patriotik, berkarakter, serta memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Kegiatan itu juga diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh unsur masyarakat.

Kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan lintas organisasi, terutama yang berada di bawah pembinaan Kodam XX/TIB. Selain dari Pemuda Panca Marga (PPM), hadir juga perwakilan dari P3AD, PPAD, dan Forum Komunikasi Putra-Putri TNI (FKPPI).

Ketua FKPPI Sumatera Barat Endarmy yang juga anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat menambahkan, sinergi antar organisasi kepemudaan, keluarga besar TNI, dan seluruh unsur masyarakat sangat penting untuk memperluas wawasan kebangsaan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Masyarakat harus menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga keutuhan NKRI," tegas Endarmy.

Membuka kegiatan itu, Letkol. Kav. Mahpuzh dari Kodam XX/TIB menyampaikan, pembinaan bela negara merupakan bagian dari upaya memperkuat rasa persatuan dan cinta tanah air. Dia berharap melalui kegiatan itu dapat meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, memperkokoh persatuan bangsa demi menjaga keutuhan NKRI. P

Pawai Khatam Quran TPQ/TQA Masjid Alhuda

Ketua DPRD Sumbar Dorong Pembentukan Karakter Generasi Qurani



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi mendorong terciptanya generasi masa depan bangsa yang berakhlak mulia, berilmu, dan memiliki karakter Qurani.

Hal itu disampaikan Muhidi saat melepas secara resmi pawai Khatam Al-Qur'an Perdana TPQ/TQA Masjid Al-Huda, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Minggu (7/6/2026).

"Khatam Al-Quran tidak hanya sekadar seremoni namun hendaknya dijadikan sebagai momentum penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan memiliki karakter Qurani," kata Muhidi.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pengurus dan para guru mengaji Masjid Al-Huda, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembinaan generasi muda melalui pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) memiliki peran strategis untuk memperkuat pendidikan agama di tengah tantangan perkembangan zaman.

Menurutnya, pembinaan sejak usia dini menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian anak agar tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki iman dan akhlak yang baik. Muhidi mengajak orang tua dan seluruh masyarakat untuk terus mendukung kegiatan pendidikan Al-Quran bagi anak-anak sebagai dasar dan pedoman dalam menjalani kehidupan di masa depan.

"Kita berharap anak-anak yang hari ini mengikuti Khatam Al-Qur'an tidak berhenti belajar, tetapi terus mendalami, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an sebagai pedoman hidup," katanya.

Ia berharap pendidikan Al-Quran di seluruh masjid melalui lembaga pendidikan TPA/TPQ dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membentuk generasi muda yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Kegiatan itu menjadi wujud nyata sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi penerus bangsa. T

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar:

Rehabilitasi Pascabencana Prioritaskan Jalan, Jembatan, dan Irigasi



Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra mengingatkan, penanganan pascabencana membutuhkan koordinasi yang kuat antarpemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemulihan pascabencana membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga tidak bisa ditangani secara sepihak, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota saja.

Hal itu ditegaskan Doni Harsiva Yandra saat rapat kerja Komisi IV DPRD Sumatera Barat dengan beberapa OPD mitra kerja terkait, Senin (11/5/2026). Menurutnya, pemulihan pascabencana untuk sarana infrastruktur harus lebih difokuskan kepada perbaikan jalan, jembatan, dan irigasi.

"Penananganan pascabencana harus dilakukan melalui koordinasi yang kuat, antarpemerintah daerah dan dengan pemerintah pusat karena kebutuhan anggaran cukup besar," kata Doni.

Dia menyebutkan, perkiraan kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana akhir November 2025 lalu bisa mencapai Rp17,9 triliun. Kebutuhan tersebut mencakup penanganan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/ kota, jembatan, normalisasi sungai, dan perbaikan jaringan irigasi.

"DPRD Sumatera Barat mendorong koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran ini, dan mengoptimalkan juga anggaran melalui APBD provinsi," tambahnya.

Dia meminta agar koordinasi antar satuan kerja teknis atau balai yang menangani masalah jalan, jembatan, sungai, dan irigasi untuk terus diintensifkan. Pemerintah kabupaten/ kota hendaknya menyusun dokumen usulan yang dibutuhkan untuk dsampaikan ke pemerintah pusat.

"Harus optimal dalam melakukan koordinasi untuk kelengkapan dokumen yang akan diajukan ke pemerintah pusat," ujarnya.

Dia menyarankan, pemerintah provinsi juga harus melakukan koordinasi terkait program infrastruktur yang dibiayai melalui skema pendanaan transfer ke daerah. Hal itu diperlukan agar penanganan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sejumlah usulan penanganan infrastruktur nantinya direncanakan masuk ke dalam program Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) terutama untuk jalan, jembatan, sungai, dan irigasi. Dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan infrastruktur tersebut sangat memengaruhi perekonomian karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan kerusakan lahan pertanian.

Rapat kerja Komisi IV DPRD Sumatera Barat tersebut dihadiri oleh pejabat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V. Diharapkan melalui koordinasi yang kuat dapat mempercepat pemulihan dampak bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu. P

Ketua DPRD Sumbar Ajak Semua Pihak Perkuat Kolaborasi untuk Sekolah Ramah Anak

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan komitmen untuk terus mendukung program-program pendidikan yang berorientasi kepada pemenuhan hak-hak anak. Pembangunan sektor pendidikan menjadi perhatian besar demi menciptakan generasi masa depan bangsa yang unggul dan berkualitas.

Muhidi menyampaikan hal itu saat menghadiri pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mendukung terwujudnya sekolah ramah anak, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia yang dimulai sejak usia anak-anak merupakan "investasi" yang jauh lebih penting dari pada pembangunan fisik.

"DPRD Sumatera Barat akan terus berupaya mendorong berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada pemenuhan hak-hak anak, sebab pembangunan sumber daya manusia jauh lebih penting dari pada pembangunan infrastruktur karena menyangkut masa depan generasi bangsa," tegasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik bisa direncanakan dan hasilnya langsung dirasakan setelah selesai dan dimanfaatkan. Namun pembangunan sumber daya manusia membutuhkan program yang berkelanjutan dan harus dirancang secara serius karena menyangkut masa depan



generasi bangsa.

"Untuk menciptakan generasi bangsa yang unggul dan berkualitas membutuhkan perhatian serius dan peran aktif semua pihak. Keberhasilan pembangunan SDM akan terlihat ketika generasi muda memiliki kualitas dan karakter yang baik," ulasnya.

Dalam kesempatan itu, Muhidi menegaskan, DPRD Sumatera Barat terus berupaya memperkuat pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai kebijakan, baik melalui regulasi maupun dari sisi dukungan anggaran. Pihaknya juga mendorong kebijakan untuk mewujudkan kabupaten dan kota layak anak di seluruh Sumatera Barat.

Selain membuat regulasi dan memberikan dukungan anggaran, Muhidi juga menegaskan, DPRD Sumatera Barat akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya program pembangunan di sektor pendidikan. Setiap program dipastikan dilaksanakan dengan baik oleh instansi terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak.

Muhidi menyebutkan, pelatihan Konvesi Hak Anak yang ditujukan kepada kepala sekolah dan guru yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif kepada pemenuhan hak-hak anak di lingkungan sekolah. Materi pelatihan yang diberikan hendaknya diaplikasikan dalam proses pembelajaran sehingga menjadikan lingkungan sekolah menjadi lingkungan ramah anak. P

PT Perseroda Jamkrida Akan Dapat Suntikan Hingga Rp400 Miliar



PT Perseroan Daerah (Perseroda) Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) akan mendapatkan suntikan dana penyertaan modal pemerintah daerah hingga Rp400 miliar yang akan dipenuhi secara bertahap. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru bisa menyertakan modalnya sebesar Rp78,6 miliar dari ketentuan maksimal Rp81 miliar disebabkan peraturan daerah.

Perubahan besaran penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT Jamkrida tersebut bisa dilaksanakan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (5/5/2026).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman membuka rapat paripurna penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke PT Jamkrida tersebut menjelaskan, PT Jamkrida merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selama ini telah melaksanakan mandat penjaminan bagi masyarakat dalam memperoleh akses modal pada perbankan.

"Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp78,6 miliar kepada PT Jamkrida. Selain itu, juga telah ditambah dengan aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp10.804.804.000 yang belum dapat ditambahkan sebagai modal disetor karena totalnya akan melebihi jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp81 miliar dengan Perda yang berlaku saat ini," terang Evi Yandri.

Dengan perkembangan yang ada, lanjutnya, bentuk hukum PT. Jamkrida Sumbar juga telah dilakukan penyesuaian menjadi Perseroda yang ditetapkan dengan Perda No. 6 Tahun 2024. Dalam Perda tersebut ditetapkan bahwa modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp400 miliar.

"Dengan telah berubah menjadi Perseroda, modal dasar yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentunya harus dipenuhi secara bertahap. Modal tersebut tentu akan sangat menentukan bagaimana PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) dapat melakukan percepatan ekspansi penjaminan kredit untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat," ujarnya.

Untuk itu, dengan melakukan perubahan Perda terhadap Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dalam mengakses modal dan memberi dampak terhadap peningkatan penerimaan daerah dari Sektor PAD.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam menyambut penetapan Perda tersebut menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan yang diberikan. Menurut Mahyeldi, Ranperda tentang penyertaan modal tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja PT Jamkrida dalam memperkuat struktur permodalan dan memperluas akses pembiayaan pelaku usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Dengan memperkuat permodalan, diharapkan PT Jamkrida mampu meningkatkan kapasitas kredit sehingga mendorong akses pembiayaan pelaku usaha terutama UMKM yang nantinya akan memberikan dampak kepada peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Mahyeldi.

Dia menambahkan, melalui penguatan tersebut diharapkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha semakin luas dan inklusif. Dengan demikian, akan mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat yang akan berdampak kepada peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Lebih jauh, penguatan PT Jamkrida tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi positif kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Sekaligus, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Rapat paripurna tersebut, selain beragendakan pengambilan keputusan terhadap Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jamkrida, juga beragendakan pembentukan panitia khusus DPRD Sumatera Barat untuk Pengelolaan Aset Daerah. P



Komisi I DPRD Sumbar Tinjau Penerapan SPBE di Kota Payakumbuh

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berkunjung ke Kota Payakumbuh, Kamis (7/5/2026). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Payakumbuh.

Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Sawal mengatakan, digitalisasi sistem pemerintahan meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam rangka percepatan reformasi birokrasi. Dia menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh yang telah berupaya maksimal dalam penerapan SPBE.

"Sebagai bagian tugas pengawasan yang dimiliki, DPRD Sumatera Barat ingin memastikan digitalisasi sistem dalam tata Kelola pemerintahan telah berjalan dengan baik, terintegrasi kepada berbagai pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan," kata Sawal dalam kunjungan yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Kurniawan Syah Putra tersebut.

Dalam kunjungan itu, bersama Sawal ikut beberapa orang anggota Komisi I DPRD Sumatera Barat antara lain Wakil Ketua Komisi I Abdul Rahman, Sekretaris Komisi I Bagas Panyusunan Nasution, beberapa orang anggota Komisi I yakni Irsyad Syafar, Indra Catri, Aida, Zuldafri Darma, dan Masrisal.

Sawal menilai, penerapan SPBE di Kota Payakumbuh telah menunjukkan kemajuan cukup baik. Selain itu, beberapa jenis pelayanan juga telah ditransformasikan ke system digital sehingga semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Sekdako Payakumbuh Rida Ananda menjelaskan, Kota Payakumbuh berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE. Kota Payakumbuh menjadikan digitalisasi pelayanan sebagai prioritas dengan terus mengakselerasi transformasi kepada layanan digital.

"Dengan adanya kunjungan dari DPRD Sumatera Barat kami berharap ke depan sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten semakin meningkat melalui sistem elektronik yang terintegrasi sehingga memudahkan koordinasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Kurniawan Syah Putra menambahkan, Kota Payakumbuh dalam penerapan SPBE setiap tahun terus mengalami peningkatan kinerja. Kemenerian PAN-RB menilai capaian indeks SPBE Kota Payakumbuh terus meningkat secara konsisten.

"Penilaian ini menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan capaian kinerja

dalam penerapan SPBE ke depan sekaligus sebagai modal untuk terus bergerak menuju fase transformasi digital," kata Kurniawan.

Dia menyampaikan, Kota Payakumbuh telah memiliki backbone fiber optik yang saling terhubung. Selain itu juga membangun system redundasi untuk memastikan jika satu jalur jaringan terganggu, masih ada jalur lain sehingga layanan publik tidak berhenti. Untuk efisiensi dan pengamanan data, pihaknya memanfaatkan cloud server dari Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi).

Terkait aplikasi yang telah dibangun untuk penunjang infrastruktur digital, Pemko Payakumbuh telah memiliki MyKOPAY sebagai sistem terintegrasi yang menjadi tulang punggung berbagai layanan. Kemudian ada e-Kinerja untuk penilaian kinerja pegawai secara objektif, e-SPPD untuk perjalanan dinas, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan dasawisma terintegrasi, hingga SiPADUKO untuk Puskesmas.

Selain itu juga mengembangkan Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat (BIG DATA) yang berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Kota Payakumbuh telah meluncurkan MPP Digital pada 2024 lalu. Sebagian besar layanan perizinan berusaha melalui OSS RBA, e-KKPR, hingga SIMPAD untuk PBB perdesaan dan perkotaan, semua sudah bisa diakses secara digital. Demikian juga dengan layanan paspor, masyarakat cukup daftar online lewat m-Paspor. P

Jalan Bayang-Alahan Panjang dan Jembatan Anduriang Harus Tuntas Tahun Depan



Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra menegaskan, pembangunan jalan tembus Bayang-Alahan Panjang dan jembatan Anduriang harus diprirotaskan. Jalan penghubung Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok serta jembatan di Kabupaten Padang Pariaman tersebut paling lambat sudah harus tuntas tahun 2027 mendatang.

Hal itu ditegaskan Doni Harsiva Yandra dalam rapat komisi IV DPRD Sumatera Barat bersama OPD mitra kerja terkait, Senin (11/5/2026). Rapat kerja yang dihadiri antara lain dari BPJN, BWS, dan Dinas BMCKTR tersebut fokus membahas percepatan rehabilitasi infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana alam pada akhir November 2025 lalu.

"Dua proyek ini (jalan Bayang-Alahan Panjang dan jembatan Anduriang) sudah di pemerintah pusat, sudah dalam tahap perencanaan dari pihak balai. Kami minta tahun depan sudah dikerjakan tuntas," kata Doni.

Doni menegaskan, rehabilitasi pasacabencana membutuhkan koordinasi yang kuat. Baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupten/kota maupun dengan pemerintah pusat. Untuk percepatan pemulihan, pemerintah daerah harus segera menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, sehingga nantinya bisa dilihat untuk dilaksanakan sesuai kewenangan. J

"Untuk pemerintah pusat terutama, dokumen harus disiapkan secara cermat berupa detail engineering design (DED) dan lainnya agar memudahkan dalam proses administrasinya untuk dialokasikan penganggarannya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Doni juga mengungkapkan, selain jalan dan jembatan, normalisasi sungai dan perbaikan jaringan irigasi juga harus menjadi prioritas. Normalisasi sungai dan perbaikan irigasi sangat dibutuhkan agar lahan pertanian masyarakat Kembali bisa dimanfaatkan untuk perekonomian masyarakat. P

BK DPRD Sumbar Terima Kunjungan DPRD Banten

Pelajari Sistem Pengawasan Etika dan Tata Tertib



Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja BK DPRD Provinsi Banten, Selasa (19/5). Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mempelajari sistem pengawasan etika dan mekanisme tata tertib kedewanan yang diterapkan di DPRD Sumatera Barat.

Wakil Ketua BK DPRD Sumatera Barat Muzli M. Nur usai menyambut kunjungan tersebut menjelaskan, DPRD Banten sedang Menyusun perubahan tata tertib, tata cara beracara, dan kode etik DPRD. Kunjungan tersebut untuk mencari referensi dan mempelajari penyusunan dan pelaksanaannya di DPRD Sumatera Barat.

"Referensi ini penting bagi penyempurnaan setiap pembahasan di lembaga DPRD, jadi DPRD Banten ingin mencari referensi ini di DPRD Sumatera Barat untuk dijadikan bahan kajian dan pertimbangan dalam penyusunan perubahan kode etik, tata tertib, dan tata beracara yang sedang dibahas," terang Muzli.

Ia menerangkan, BK DPRD Sumatera Barat telah membagikan berbagai informasu dan dokumen yang dibutuhkan di dalam kunjungan tersebut. Ia berharap hal itu dapat membantu DPRD Provinsi Banten untuk menuntaskan pembahasan yang tengah dilakukan.

Kunjungan kerja dan saling berbagi informasi tersebut menurut Muzli, selain untuk menguatkan hubungan lembaga DPRD antardaerah, juga untuk saling memperkuat peran Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD. Melalui kunjungan kerja, bisa saling membagikan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sehingga semakin meningkatkan kemampuan Badan Kehormatan dalam pengawasan internal DPRD dan meningkatkan kepercayaan publik.

Ia menekankan, BK DPRD Sumatera Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan peran Badan Kehormatan dalam menjalankan fungsinya menjaga disiplin, etika, dan marwah lembaga DPRD. Keberadaan Badan Kehormatan tidak untuk formalitas saja melainkan memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengawal integritas lembaga DPRD.

Dalam kunjungan tersebut, anggota BK DPRD Provinsi Banten Desy Yusandi memaparkan, DPRD Sumatera Barat dipilih sebagai tujuan kunjungan karena dinilai memiliki regulasi tata tertib, kode etik, dan tata cara beracara yang lengkap. Dokumen regulasi tersebut dapat diadposi dan diapilikasikan di Provinsi Banten setelah dilakukan penyesuaian dengan kondisi daerah.

Desy menambahkan, penguatan peran BK krusial untuk menjaga citra legislatif di mata masyarakat. Regulasi yang jelas dan tegas akan melahirkan sistem pengawasan yang lebih profesional dan terukur, untuk memastikan fungsi Badan Kehormatan berjalan efektif agar marwah lembaga tetap terjaga. T

Tindak Lanjut Pertanggungjawaban APBD dan LHP BPK

Komisi III DPRD Sumbar Rapat dengan Mitra Kerja



Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat kerja lanjutan dengan mitra kerja, Rabu (24/6/2026). Mitra kerja yang dihadirkan untuk rapat tersebut antara lain dari Bank Nagari, PT Jamkrida, PT Balairung Citra Jaya Sumbar, dan Biro Perekonomian Pemprov Sumatera Barat.

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat Indra Datuak Rajo Lelo.

Pembahasan dalam rapat tersebut adalah pertama pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang berada di bawah kewenangan masing-masing mitra kerja.

Kemudian terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah semester pertama tahun 2026 serta proyeksi target pendapatan dan realisasi belanja semester kedua tahun 2026.

Pembahasan lainnya adalah tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Seperti diketahui, Sumatera Barat kembali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD tahun 2025.

"Meski demikian, sejumlah catatan dan saran perbaikan yang direkomendasikan oleh BPK penting ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan," kata Indra.

Ia menegaskan, rapat dengan mitra kerja tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. P

Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Untuk Atasi Ketimpangan Kontribusi Ekonomi dan Kesejahteraan Petani

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Asril menilai, kesenjangan kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi daerah belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan petani yang menggantungkan hidup di sektor tersebut. Hal itu mengindikasikan ada hal yang harus dibenahi agar masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan.

Hal itu disampaikan Asril terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang saat ini tengah dibahas oleh Komisi II DPRD Sumatera Barat.

"Ketimpangan antara kontribusi ekonomi dan porsi tenaga kerja ini mengindikasikan adanya kesenjangan kesejahteraan yang nyata antara petani dan pelaku sektor non-pertanian," kata Asril.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut memperkuat pentingnya kehadiran sebuah regulasi yang memberikan paying hukum untuk perlindungan dan pemberdayaan petani. Tanpa adanya payung hukum yang kuat, kesenjangan ekonomi antara sektor pertanian dan non-pertanian akan semakin melebar.

Senada, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Khairuddin Simanjuntak juga menjelaskan, pembentukan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan mewujudkan kedaulatan petani. Ranperda tersebut dirancang untuk meningkatkan taraf kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Ranperda tersebut juga diarahkan untuk memperluas ruang gerak pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian usaha dan melindungi petani dari praktik ekonomi biaya tinggi.

"Ranperda ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan mereka dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan," kata Khairuddin.

Ia menjelaskan, keterbatasan modal membuat petani sering menghadapi dilema berat antara kebutuhan konsumsi dan investasi usaha. Keinginan untuk meningkatkan modal usaha berbenturan dengan tuntutan kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan modal tersebut memaksa petani untuk menekan biaya usaha sehingga produktivitas juga tidak maksimal.

Kondisi tersebut membuat petani sangat rentan terhadap dampak buruk kejadian luar biasa, seperti bencana alam dan serangan hama. Ditambah lagi dengan ancaman penurunan harga jual hasil panen serta lonjakan kenaikan harga pupuk dan bibit.



Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan demi memberikan dukungan dan perlindungan nyata kepada petani. Intervensi melalui regulasi sangat mendesak untuk mendongkrak profitabilitas serta menjaga keberlanjutan sumber pendapatan utama masyarakat petani.

"Kebijakan pemerintah ini bukan hanya menguntungkan petani tetapi juga masyarakat umum. Petani yang kuat akan memperkuat ketahanan pangan dan menyokong perekonomian," tutupnya. T

DPRD Sumbar Konsultasi ke Kemendikdasmen

Pastikan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Selaras dengan Kebijakan Nasional



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memastikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional.

Konsultasi tersebut dilaksanakan Rabu (2/6/2026) dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dan Wakil Ketua, Evi Yandri Rajo Budiman Bersama pimpinan dan anggota Komisi V. Terkait Ranperda tersebut, Muhidi mengatakan, perubahan regulasi pendidikan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi tantangan masa depan tanpa meninggalkan identitas budaya daerah.

"Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi yang cerdas, terampil, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," ujar Muhidi.

Menurutnya, perkembangan teknologi, perubahan sistem pembelajaran, serta kebutuhan dunia kerja yang terus berubah menuntut adanya penyempurnaan regulasi pendidikan agar lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Ranperda tersebut merupakan usul prakarsa DPRD Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna pada 6 Mei 2026. Saat ini pembahasannya telah memasuki tahapan lanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat Lazuardi Erman mengatakan, evaluasi terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2019 menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek penting yang belum terakomodasi secara optimal. Perda yang berlaku saat ini masih lebih banyak mengatur aspek administratif dan belum memberikan perhatian yang cukup terhadap penguatan karakter peserta didik berbasis nilai-nilai lokal Minangkabau.

"Perda yang ada belum secara eksplisit menekankan pembentukan karakter generasi Minangkabau dalam aspek religius, diplomasi, kewirausahaan, dan seni budaya," kata Lazuardi.

Selain itu, lanjutnya, DPRD Sumatera Barat juga menilai belum adanya kebijakan strategis yang mendorong penguasaan bahasa internasional sebagai bekal generasi muda menghadapi persaingan global. Menurutnya, penguasaan bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Arab, dan bahasa internasional lainnya menjadi kebutuhan penting agar lulusan pendidikan di Sumatera Barat memiliki daya saing yang lebih baik.

Ia menegaskan, DPRD juga mendorong agar warisan pendidikan tradisional berbasis surau mendapat perhatian lebih di dalam regulasi yang baru. Model pendidikan surau dinilai memiliki nilai historis dan filosofis yang kuat dalam membentuk karakter masyarakat Minangkabau.

"Pendidikan berbasis surau merupakan bagian dari identitas masyarakat Minangkabau

yang perlu direvitalisasi dan disinergikan dengan sistem pendidikan modern," ujarnya.

Selain aspek kurikulum dan karakter, regulasi yang baru juga akan memuat penguatan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi guru serta tenaga kependidikan. Menurut Lazuardi, guru memiliki peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga negara dan pemerintah daerah perlu memberikan perlindungan yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan harus dipahami dalam dua dimensi sekaligus, yakni sebagai instrumen peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dan sebagai sarana memperluas kesempatan hidup yang lebih baik. Pendidikan tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga memperkuat mobilitas sosial dan membentuk karakter generasi muda.

Melalui konsultasi ke Kemendikdasmen tersebut, diharapkan pembahasan dapat menghasilkan sebuah peraturan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya Minangkabau ke dalam sistem pendidikan. Selain itu juga memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan daya saing global peserta didik, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga pendidik dan kependidikan. T

Penguatan Fungsi Representasi dan Penyerapan Aspirasi

Bamus DPRD Sumbar Kunjungi DPRD DKI Jakarta

Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berkunjung ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka studi komparatif penyusunan kerja DPRD. Kunjungan itu dilakukan untuk memperkuat fungsi representasi dan penyerapan aspirasi masyarakat di dalam penyusunan rencana kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi yang memimpin kunjungan tersebut, Kamis (21/5/2026) menjelaskan, selama ini pelaksanaan tugas kedewanan masih cenderung terfokus pada tiga fungsi utama yang bersifat rutin, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ia menjelaskan, fungsi legislasi selama ini lebih dominan pada pembentukan peraturan daerah (Perda), sementara fungsi penganggaran berkutat pada pembahasan APBD induk, APBD perubahan, hingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.

Sedangkan fungsi pengawasan, lanjutnya, masih lebih banyak berada dalam koridor kontrol kebijakan dan peninjauan lapangan. Karena itu, DPRD Sumatera Barat menilai perlu adanya penguatan terhadap fungsi representasi rakyat yang belum maksimal untuk diakomodir di dalam pola kerja DPRD ke depan.

"Selain tiga fungsi tersebut, sebenarnya ada tugas penting yang mestinya juga harus dioptimalkan yaitu bagaimana menampung aspirasi dan mewakili rakyat. Ini yang sedang kita coba formulasikan di dalam rencana kerja ke depan agar lebih menyentuh fungsi representasi," kata Muihdi.

Ia menegaskan, DPRD tidak hanya bertugas membahas regulasi dan anggaran, tetapi juga harus mampu menghadirkan ruang yang lebih konkret dalam menyerap dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Menurutnya, kunjungan ke DPRD DKI Jakarta menjadi bagian dari upaya DPRD Sumbar untuk mempelajari berbagai inovasi dan kreativitas program kerja kelembagaan yang telah diterapkan di daerah lain, khususnya dalam penguatan fungsi representasi masyarakat.

"Kita datang untuk menimba pengalaman dan melihat bagaimana DPRD lain menghadirkan program-program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, di luar rutinitas formal kedewanan," katanya.

Sebelum melakukan kunjungan ke DPRD DKI Jakarta, rombongan Bamus DPRD Sumatera Barat juga telah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap inovasi program penyerapan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan ke dalam Renja DPRD memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di



kemudian hari.

Muhidi menegaskan, penguatan fungsi representasi masyarakat tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran.

Sementara itu, Anggota Bamus DPRD Sumatera Barat Irsyad Safar mengatakan, konsultasi ke DPRD DKI dilakukan untuk memastikan sejumlah substansi dalam penyusunan Renja DPRD tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Salah satu poin yang dikonsultasikan adalah terkait perlu atau tidaknya Renja DPRD memuat visi dan misi seperti halnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Hasil konsultasi menyebutkan bahwa Renja DPRD berbeda dengan RPJMD dan tidak memerlukan visi misi," ujar Irsyad.

Sementara konsultasi ke Kemendagri mempertanyakan terkait mekanisme penyusunan pagu anggaran dalam Renja DPRD. Menurut Irsyad, Kemendagri menegaskan bahwa pagu anggaran dalam Renja sebaiknya disusun berdasarkan kebutuhan program secara menyeluruh dan tidak dibatasi hanya karena pertimbangan sementara.

Kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta diterima oleh Anggota DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau. Dalam kesempatan tersebut Bun Joi Phiau menyampaikan, penyusunan Renja DPRD DKI Jakarta juga diarahkan untuk memperkuat fungsi representasi dan pelayanan aspirasi masyarakat secara lebih terukur dan berbasis kebutuhan publik.

Menurutnya, DPRD tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi formal kelembagaan, tetapi juga harus mampu menghadirkan program kerja yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Seluruh program yang dimasukkan ke dalam Renja DPRD harus memiliki indikator kinerja yang jelas agar pelaksanaan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

"Renja DPRD harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, pola penyerapan aspirasi, penguatan komunikasi publik, hingga efektivitas kerja kedewanan menjadi bagian penting dalam penyusunan program kerja DPRD DKI," ujarnya. T



Sektor Pertanian Dominasi PDRB

Namun Kepemilikan Lahan Masyarakat Kurang Satu Hektare

Kepemilikan lahan rata-rata masyarakat di Sumatera Barat tidak sampai satu hektare, bahkan ada yang hanya memiliki lahan seribu meter persegi. Kondisi itu kontras dengan kondisi sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan angka 21,37 persen.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Khairuddin Simanjuntak dalam rapat paripurna penetapan Ranperda tentang Perlindungan Petani menjadi usul Prakarsa DPRD, Rabu (6/5/2026).

Menurut Khairuddin, sektor pertanian Sumatera Barat dalam kenyataannya dicirikan oleh dominasi pertanian skala kecil. Melihat data Sensus Pertanian 2023, lebih dari 50 persen rumah tangga usaha pertanian di Sumatera Barat termasuk kategori gurem atau menguasai kurang dari 0,5 hektar lahan pertanian.

"Sekitar 18 persen bahkan hanya menguasai lahan kurang dari 1.000 meter persegi atau kurang dari sepersepuluh hektar," ungkap Khairuddin.

Ia menambahkan, artinya, lebih dari 70 persen Rumah Tangga Usaha Pertanian hanya menguasai lahan kurang dari 1 hektar. Itu mengindikasikan bahwa sebagian besar petani Sumatera Barat, terutama petani gurem, merupakan petani paruh waktu, karena harus mencurahkan tenaga, tidak hanya dalam usaha tani akan tetapi juga di luar usaha tani untuk memperoleh lebih dari separuh pendapatan rumah tangga.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di subsektor peternakan. Menurut Khairuddin, meskipun dalam dalam beberapa tahun terakhir peternakan menunjukkan potensi yang cukup besar. Namun, sektor ini juga memiliki kerentanan terhadap penyakit, bencana alam, dan persoalan infrastruktur dan pendukung produksi.

Kenyataan itu menurut Khairuddin menunjukkkan kerentanan petani Sumatera Barat terhadap dampak buruk kejadian seperti bencana alam, ledakan serangan hama, penurunan dan sebagainya. Petani akan meminimalkan biaya usaha dan lebih memprioritaskan konsumsi keluarga di atas kebutuhan investasi usaha tani.

"Dengan karakter petani dan pertanian seperti itu, maka diperlukan berbagai kebijakan dukungan dan perlindungan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung sektor-sektor perekonomian masyarakat," katanya.

Berangkat dari berbagai pemikiran tersebut, lanjutnya, DPRD Sumatera Barat melalui komisi II mennggagas Ranperda Usul Prakarsa tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk dijadikan peraturan daerah. Peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Melalui regulasi tersebut, memperkuat peran pemerintah daerah dalam menyediakan sarana prasarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, memberikan kepastian usaha, melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen. Kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas

petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan, serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Memimpin rapat paripurna penetapan usul prakarsa tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria menegaskan, sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, petani masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses terhadap modal, sarana produksi, teknologi pertanian, hingga fluktuasi harga komoditas yang tidak menguntungkan.

"Ranperda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi petani Sumatera Barat dalam memperoleh perlindungan dari risiko gagal panen, fluktuasi harga, bencana alam, dan ancaman lainnya, serta untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing petani melalui berbagai program pemberdayaan yang terstruktur dan berkesinambungan," tegasnya.

Substansi pokok Ranperda tersebut mencakup pengaturan mengenai perencanaan pertanian terpadu, perlindungan lahan pertanian, kemudahan akses pembiayaan dan asuransi pertanian, pemberdayaan kelembagaan petani, penyuluhan dan pelatihan pertanian, serta penguatan sistem pemasaran hasil pertanian.

"Dengan hadirnya Perda ini, kami berharap petani Sumatera Barat dapat lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global," kata Nanda. P

Lima Bulan Pascabencana

Endarmy Sorot Jembatan Anduriang Kayu Tanam Belum Diperbaiki



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Endarmy menyoroti kondisi jembatan di Anduriang Kayu Taman Kabupaten Padang Pariaman yang tak kunjung diperbaiki. Jembatan tersebut rusak akibat dilanda banjir bandang pada akhir November 2025 lalu.

"Jembatan ini merupakan akses penghubung Nagari Anduriang dan Nagari Kayu Tanam, mengalami kerusakan pada saat bencana banjir bandang lima bulan lalu namun sampai kini tak kunjung diperbaiki," tegas Endarmy, Senin (11/5/2026).

Dia menyayangkan lambannya penanganan jembatan tersebut, padahal merupakan jalur utama bagi masyarakat di nagari tersebut. Sementara ini, masyarakat terpaksa lewat ke jalur lain yang lebih jauh dan memakan Waktu lebih lama. Sebagian masyarakat lainnya juga terpaksa menggunakan rakit sederhana untuk menyeberangi sungai dan berisiko ketika arus sungai deras akibat hujan.

"Setiap hari merupakan akses utama mobilitas masyarakat terutama pelajar menuju dan pulang dari sekolah, sejak rusak terpaksa mengambil jalan lain yang lebih jauh dan tentunya memakan waktu lebih lama, ada juga yang terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang" katanya.

Dia meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat untuk menyikapi kondisi tersebut. Untuk solusi jangka pendek, ia meminta agar dibangun jembatan gantung agar aktivitas masyarakat Kembali normal.

Endarmy juga mengungkap, kondisi sungai di daerah tersebut juga mengalami kerusakan akibat bencana banjir bandang. Ia meminta untuk dilakukan normalisasi agar tidak mengancam keselamatan penduduk.

Dia meminta pemerintah untuk lebih serius dalam pemulihan pascabencana agar aktivitas masyarakat kembali normal. Sarana infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan harus disegerakan penanganannya. Aktivitas harus diusahakan kembali normal, agar perekonomian masyarakat bisa kembali normal. P

Sosialisasi Perda Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2018

Evi Yandri: Seluruh Pihak Bertanggung Jawab Cegah Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman menegaskan, pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan apparat penegak hukum. Namun, tanggung jawab tersebut berada pada pundak seluruh unsur masyarakat.

Hal itu ditegaskan Evi Yandri saat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), di Kantor Camat Nanggalo, Kota Padang, Minggu (14/6/2026).

Evi Yandri menjelaskan, Perda Nomor 9 Tahun 2018 lahir berangkat dari kekhawatiran semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif lainnya.

"Dengan lahirnya Perda Nomor 9 tentang Narkotika ini maka semua pihak memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing," katanya.

Ia menjelaskan, narkoba telah menjadi ancaman yang serius bagi generasi bangsa karena peredarannya yang semakin marak, sementara efek yang ditimbulkan karena penyalahgunaan penggunaannya sangat buruk bagi Kesehatan fisik dan mental.

Ia berharap, melalui sosialisasi Perda tersebut,



masyarakat semakin menyadari bahwa narkoba menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Dengan demikian, maka seluruh unsur masyarakat akan semakin bersemangat untuk memerangi narkoba.

Sosialisasi itu menghadirkan beberapa orang narasumber antara lain Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Doni Rahma Saputra, Analis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Eka Rosiana, dan Ketua Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI) Syafrizal.

Doni Rahma Saputra memaparkan, 80 persen peredaran narkoba di Indonesia datang melalui jalur darat. Jumlah pemakai narkoba setiap hari terus bertambah, sementara masyarakat masih ragu atau takut untuk melaporkan meskipun mengetahui adanya tindak penyalahgunaan narkoba.

"Dengan adanya Perda Nomor 9 Tahun 2018 ini, maka dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan pengawasannya ada pasal yang mangatur dan melindungi peran serta masyarakat," ujarnya.

Sementara Analis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Eka Rosiana menjelaskan, terdata ribuan kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat melibatkan remaja dalam rentang usia 15 sampai 19 tahun. Jenis narkoba yang sering ditemukan penyalahgunaannya adalah ganja, sabu, dan ekstasi.

Syafrizal dari YPJI, yayasan yang konsern pada penanganan korban penyalahgunaan narkoba dan masalah kejiwaan dalam kesempatan itu juga menghadirkan empat orang penyintas narkoba yang tengah menjalani proses rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa narkoba memang sangat berbahaya dan sangat merusak mental penggunanya. P



Hari Buruh Sedunia

KSPSI Unjuk Rasa ke DPRD Sumbar Tuntut Kenaikan Upah Pekerja

Ratusan masyarakat yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (4/5/2026). Aksi dalam rangka peringatan hari buruh sedunia itu menyampaikan tuntutan agar DPRD memperjuangkan aspirasi mereka kepada pihak perusahaan terkait kenaikan upah dan kesejahteraan pekerja.

Kedatangan masyarakat pekerja tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman didampingi Sekretaris DPRD, Maifrizon.

Dalam kesempatan itu, pengunjuk rasa meminta DPRD Sumatera Barat memperjuangkan kesejahteraan pekerja yang belum diperhatikan dengan baik oleh pihak perusahaan. Selain menuntut kenaikan upah, pengunjuk rasa juga menyampaikan soal perlakuan perusahaan yang kurang memperhatikan hak pekerja, termasuk juga mengenai masalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Menjawab persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki.

"Aspirasi dari pekerja hari ini akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki DPRD demi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat," tegas Evi Yandri.

Dia menyampaikan, terhadap persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, persoalannya akan dibahas dengan pemerintah daerah. Sedangkan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan ke pusat sebagai penyaluran aspirasi masyarakat dari daerah.

Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja di Sumatera Barat yang menyuarakan aspirasi. DPRD, katanya, adalah wadah bagi seluruh aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki sebagai wakil rakyat dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. P

Bahas Persoalan Ketenagakerjaan, DPRD Sumbar dan KSPSI-Mahasiswa Beraudiensi



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman bersama Komisi V melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan mahasiswa membahas masalah ketenagakerjaan, Kamis (7/5/2026).

Rapat dengar pendapat atau audiensi itu merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa damai KPSPI sebelumnya memperingati Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei. Evi Yandri menegaskan, DPRD Sumatera Barat akan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi yang disampaikan kaum pekerja sesuai kewenangan yang dimiliki.

"DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Jika itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan langsung ditindaklanjuti dengan pemerintah daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan kepada pemerintah dan DPR sebagai aspirasi dari daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat Sri Kumala Dewi mengaku prihatin terhadap adanya tindak pelanggaran terhadap hak tenaga kerja. Selain itu, ketentuan upah minimum provinsi (UMP) juga belum dilaksanakan oleh banyak perusahaan.

"Ini akan dipelajari lebih jauh dan meminta untuk memanggil pihak perusahaan serta berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti permasalahannya," kata Dewi.

Nurfirmanwansyah, anggota Komisi V lainnya menambahkan, DPRD Sumatera Barat akan mendorong pertemuan berikutnya dengan pihak perusahaan sehingga persoalan menjadi jelas. DPRD akan menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Firdaus Firman dalam pertemuan itu menjelaskan, masih banyak tenaga kerja dari berbagai perusahaan di Sumatera Barat tidak dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dalam ketentuannya, perusahaan tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawannya dapat dijerat pidana.

Audiensi perwakilan KSPSI dengan DPRD Sumatera Barat tersebut menyampaikan antara lain tuntutan mengenai kenaikan upah. Selain itu, juga mengenai perlakuan buruk perusahaan kepada pekerja, hingga masalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Peserta audiensi meminta DPRD Sumatera Barat membentuk panitia khusus untuk mendalami persoalan ketenagakerjaan tersebut. P

Polemik Bangunan Mirip Klenteng di Kawasan Mandeh

Masyarakat Mengadu ke DPRD Sumbar



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kedatangan masyarakat untuk beraudiensi terkait polemik keberadaan bangunan mirip klenteng di Kawasan Wisata Mandeh, Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (13/5/2026).

Kedatangan masyarakat tersebut diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi bersama Ketua Komisi V, Lazuardi Erman dan beberapa orang anggota Komisi V DPRD antara lain Mario Syahjohan, Sri Kumala Dewi, dan Zaksai Kasni. Turut hadir juga dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain Asisten II Setkab dan Kepala Dinas Pariwisata setempat.

Perwakilan masyarakat menyampaikan, keresahan dengan adanya bangunan klenteng di Kawasan Mandeh sudah dirasakan masyarakat khususnya di Koto XI Tarusan sejak beberapa swaktu. Mereka menduga bangunan tersebut tidak sesuai dengan izinnya, dan tidak menghormati nilai-nilai lokal masyarakat.

Menyambut kedatangan perwakilan masyarakat tersebut, Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi menegaskan akan menindaklanjuti persoalan itu. Menurutnya, seluruh proses pembangunan di daerah harus tetap memperhatikan aturan hukum, kondisi sosial, dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

Muhidi menegaskan, Provinsi Sumatera Barat memiliki kekhususan yang diakui secara nasional melalui UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Dalam kehidupan sosial, memiliki kearifan lokal yaitu filosofi Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

"Untuk itu setiap pembangunan dan investasi yang masuk ke Sumatera Barat harus menghormati dan memperhatikan kearifan lokal dan kondisi sosial yang berlaku di masyarakat," katanya.

Muhidi menambahkan, DPRD sangat mendukung masuknya investasi ke daerah karena akan memberikan dampak positif kepada perekonomian masyarakat. Meski demikian, seluruh pihak terutama investor hendaknya dapat mengedepankan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Investasi yang masuk kita hargai, namun hendaknya koordinasi dan komunikasi harus terjalin sehingga tidak muncul persoalan di kemudian hari akibat mengabaikan kearifan lokal dan kondisi sosial tersebut," katanya.

Dia meminta agar aspirasi yang berkembang di masyarakat tersebut harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah. Permasalahan tersebut harus diselesaikan secara bijaksana agar persoalan tidak berlarut-larut.

Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat Mario Syahjohan dalam kesempatan itu menegaskan, aspirasi masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti. DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menyurati Pemkab Pesisir Selatan dan pihak investor agar persoalan itu dapat diselesaikan dengan menjaga situasi tetap kondusif dan tidak menjadi polemic berkepanjangan. P